
BEVALUASI SUMATIF PROGRAM DESA MASLAHAT DI DESA KALIPUCANG KECAMATAN TUTUR KABUPATEN PASURUAN

Helmi Wisnu Satria
BPN Kota Surabaya
email: h.wisnusatria@gmail.com

Abstract

Poverty is one of the nation's problems that is the cause of the emergence of social inequality, unemployment and economic backwardness. In order to reduce the poverty rate, it is necessary to have innovative policies that are reflected by the Pasuruan Regency Government in response to these problems through Regent Decree no. 9 of 2016 concerning the Maslahat Village Program. The location of the Maslahat Village Program, one of which is in Kalipucang Village, Tukur District, has an agricultural and livestock base. The Maslahat Village Program is the flagship program of the Pasuruan Regent in optimizing village potential so that villages that are considered lagging behind in terms of development and economy can become developed villages and reduce poverty, unemployment and social inequality in them. This type of research uses descriptive qualitative research. The data collection technique was by direct interviews with informants consisting of the Village Head and Village Apparatus, the Community, Head of the Pasuruan Regency Government Service and Apparatus and Members of the Pasuruan Regency DPRD. This study uses the theory of summative evaluation or impact evaluation by using several indicators. Based on the results of the research that has been done, it can be said that this program seems to be quite successful where from the 10 summative evaluation indicators used there are several indicators that are considered very good, namely the aspect of public perception. The community does give a good perception and actively participates. In indicators of results and influence of the program, the community has felt the impact and results, although in reality there are other supporting factors and actors. Keywords: Capacity, Local Wisdom Values. Meanwhile, the indicators for general and specific objectives, cost effectiveness and cost efficiency appear to be quite good. But there are also many indicators that are not implemented, such as the absence of policy evaluations from the Regional Government which are then communicated to stakeholders. Kalipucang Village also did not anticipate well the outputs that were not anticipated by the program, namely those related to land transfer and the availability of village funds in the program. In general, the Maslahat Village Program contributes to improving the economy and development in the village with the birth of the development of MSMEs, the agricultural, livestock and tourism sectors. However, the Maslahat Village Program, if evaluated, is only a formality and routine. In addition, in the management of program implementation, there is a mal function management that does not evaluate the program so that it appears that the Maslahat Village program is a symbolic and prestigious program from the political aspect that tends to be an unsustainable program.

Keywords: *Poverty, Maslahat Village Program, Summative Program Evaluation*

PENDAHULUAN

Letak Indonesia yang berada diantara dua benua yaitu benua asia dan australia merupakan negara yang memiliki kompleksitas permasalahan yang cukup tinggi didalamnya. Permasalahan kesehatan,

lingkungan, politik dan keamanan hingga isu kemiskinan menjadi masalah bangsa yang perlu untuk diselesaikan. Sebagai negara berkembang tentunya Indonesia tidak ingin berada dalam zona ketertinggalan dan tentunya ingin berubah menjadi negara maju.

Persoalan kemiskinan masih menjadi persoalan besar pada era sekarang. Hal ini nampak atas visi Presiden Joko Widodo adalah dengan menetapkan APBN untuk semata-mata kepentingan perekonomian masyarakat, bangsa dan negara. Sebagaimana responsifnya pemerintah terhadap tingginya angka kemiskinan yang menjadi momok bagi pemerintah untuk segera ditangani.

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan bangsa Indonesia sejak sebelum kemerdekaan hingga era reformasi saat ini. Kemiskinan menjadi masalah yang kronis berkaitan dengan masalah kesenjangan dan pengangguran yang dapat menimbulkan permasalahan sosial. Penanggulangan kemiskinan merupakan tugas pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tentunya perlu adanya dukungan pula dari semua pihak dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan data dari BPS RI tahun 2020 jumlah penduduk miskin Indonesia per Maret 2020 sebanyak 26,42 juta jiwa atau sebesar 9,78%. Angka ini meningkat dari tahun 2019 yang sebesar 9,41% atau 25,14 juta penduduk. Persentase penduduk miskin terbesar terdapat di Maluku dan Papua, yaitu 20,34%. Sementara persentase terendah terdapat di Kalimantan sebanyak 5,81%. (www.bps.go.id)

Dalam melaksanakan pembangunan dan pengentasan kemiskinan peran UMKM sangat diperlukan sebagaimana telah dicanangkan sejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ditahun 2005 yang termaktub didalam kebijakan RPJMN sebagai tema sentra pembangunan Indonesia. Adapun Tujuan mendasar pembangunan dari program kebijakan tersebut adalah untuk menurunkan angka pengangguran dari 9-10 persen jumlah penduduk menjadi kurang dari 6 persen serta mengurangi jumlah orang miskin dari 15,97 persen menjadi 8,2 persen dalam waktu lima tahun pemerintahannya.

Kebijakan pengembangan UMKM sangat tepat sebab pada level terendah dan sangat menyentuh di lingkungan masyarakat pedesaan sebagaimana disektor UMKM mampu penyerapan tenaga kerja sebagaimana mampu menyediakan 97% kesempatan kerja, serta yang terkait dengan distribusi barang mencapai 70% dan sebagai produsen sebanyak 65%, yakni, produsen yang memproduksi barang dan jasa yang diterima masyarakat, (Bobo, 2003)

Salah satu strategi pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia dalam pemberdayaan masyarakat adalah mengimplementasikan Program One Village One Product (OVOP) sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 mengenai percepatan pengembangan sektor

riil dan pemberdayaan UMKM. Program OVOP merupakan gerakan masyarakat dengan melibatkan pemerintah untuk menggerakkan produk khas dari kreativitas masyarakat lokal di daerah bisa tingkat desa hingga kabupaten maupun kota.

Melihat masih banyaknya jumlah penduduk miskin di desa maka pemerintah daerah dituntut untuk bisa melakukan terobosan kebijakan dalam mengentaskan kemiskinan agar jumlah kemiskinan dapat ditekankan bahwa dalam upaya penanggulangan kemiskinan perlu disusun kebijakan yang strategis, terpadu dan terintegrasi dari semua pihak dengan mengikutsertakan masyarakat, organisasi, pemerintah dan pihak swasta dalam perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan di seluruh daerah. Menurut Easton dalam (Islamy, 2008:19), memberikan arti kebijakan negara sebagai “the authoritative allocation of values for the whole society” (pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat).

Pemerintah Kabupaten Pasuruan kemudian membuat terobosan inovasi dalam menangani hal tersebut dengan mengeluarkan Program Desa Masalahat (Maju, Aman, Sehat Lahir Batin, Adil dan Bermartabat). Program ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan dan beban masyarakat serta untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Pasuruan.

Tujuan dari Program Desa Masalahat adalah mewujudkan kondisi masyarakat yang sejahtera, mewujudkan tingkat kesehatan yang baik dan pendidikan yang bermutu, mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan berakhlak mulia serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Program Desa Masalahat adalah program inovasi daerah yang juga bertujuan untuk memaksimalkan potensi-potensi ekonomi yang ada di desa tertinggal dengan memaksimalkan potensi desa tersebut. Konsep “One Village One Product” dasar pelaksanaan Program Desa Masalahat dengan memaksimalkan potensi desa dan memprioritaskan produk unggulan.

Program Desa Masalahat yang berlandaskan pada konsep One Village One Product (OVOP) artinya satu desa satu produk. Berdasarkan Peraturan Bupati No. 9 tahun 2016 tentang Program Desa Masalahat dan Keputusan Bupati Pasuruan (Nomor: 400/670/HK/424.013/2014) tentang penetapan lokasi program desa masalahat, terdapat 24 desa dari 24 kecamatan yang terkena imbas Program Desa Masalahat. Desa-desa yang dipilih akan difokuskan pengembangan potensinya sehingga dapat menjadi branding produk keberhasilan Program Desa Masalahat. Beberapa desa yang termasuk dalam desa masalahat haruslah memiliki produk lokal yang menjadi unggulannya guna membangun membangun dan mengembangkan potensi desa tersebut.

Desa Jatirejo kecamatan Lekok sebagai penghasil kerupuk ikan. Desa Jatiarjo Kecamatan Prigen sebagai desa wisata, Desa Wonorejo Kecamatan Lumbang sebagai penghasil olahan susu (peternakan), Desa Wonosari Kecamatan Gondangwetan dengan BUMDes beras organik dan Desa Kalipucang Kecamatan Tukur sebagai produksi kopi dan susu. Dalam mengimplementasi Program Desa Maslahat di desa-desa tersebut dilaksanakan dengan sinergitas program atau kegiatan dinas terkait, pemerintah desa dan masyarakat untuk kemudian diarahkan agar fokus dalam memaksimalkan produk dan potensi unggulan dari desa yang telah terpilih menjadi program desa maslahat.

Tahun 2020 saat ini merupakan periode kedua dari kepemimpinan Bupati Pasuruan (H.M. Irsyad Yusuf, SE, MMA dan KH. Mujib Imron, SH, MH) masa jabatan 2018-2023. Dalam kepemimpinan Bupati Irsyad Yusuf dan Wakil Bupati KH. Mujib Imron terdapat beberapa program unggulan. Setidaknya ada 7 program yang telah ditetapkan oleh Bupati Irsyad dan Wakil Bupati KH. Mujib Imron sebagai upaya mewujudkan Kabupaten Pasuruan yang sejahtera, maslahat dan berdaya saing. Program unggulan yang dimaksud diantaranya Wak Moqidin (Wayaha Kumpul Mbangun TPQ dan Madin), Kenduren Mas (Kendaraan umum urun rembug masyarakat), rumahku surgaku atau model pembangunan

berbasis keluarga, Kemisan (koordinasi intensif pengentasan kemiskinan), Pasuruan Gumuyu (Guyub, Rukun dan bersatu padu).

Mencermati program unggulan Bupati Pasuruan masa jabatan 2018-2023 seperti yang telah diuraikan sebelumnya, terlihat jelas bahwa program Desa Maslahat kurang menarik sehingga tidak lagi berada pada program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan Masa Jabatan 2018-2023. Sejatinya program Desa Maslahat memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan dan pengentasan kemiskinan di tingkat desa. Diar (2019) mengemukakan adanya dampak ekonomi juga dirasakan masyarakat melalui meningkatnya pendapatan masyarakat, sebelumnya para pelaku UMKM merupakan ibu rumah tangga yang tidak memiliki pekerjaan. Adanya program Desa Maslahat menciptakan kesempatan kerja baik dalam bidang UMKM maupun pariwisata, karena dengan adanya program desa maslahat juga memberikan dampak pembangunan pada sektor lainnya yaitu perbaikan jalan dan terbentuknya desa wisata Kalipucang. Selain itu, banyak produk UMKM lokal yang dapat dikemas masyarakat dan menjadi sumber ekonomi baru.

Tidak semua pelaksanaan dari program OVOP di daerah dapat berjalan dengan baik dan berdampak terhadap perekonomian maupun pembangunan daerah. Irawan (2017) dalam penelitiannya yang berjudul Kegagalan

Implementasi Program One Village One Product (OVOP) Dalam Memajukan Potensi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi Kasus: Koperasi Serba Usaha Mulyasari Desa Pliken, Kecamatan Kembaran) mengungkapkan bahwa pelaksanaan implementasi program OVOP yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas, khususnya yang dilaksanakan di Desa Pliken Kecamatan Kembaran dapat dikatakan belum berjalan optimal. Lokasi yang ditetapkan menjadi Desa Masalah berdasarkan Keputusan Bupati Pasuruan Nomor: 400/670/HK/424.013/2014 tentang Penetapan Lokasi Program Desa Masalah Kabupaten Pasuruan salah satunya di Desa Kalipucang Kecamatan Tukur. Masyarakat dan perangkat desa setempat berperan aktif dalam mengidentifikasi potensi desa baik dari segi sumber daya alam yang dimiliki dan sumber daya manusianya. Salah satu hasil pertanian yang menonjol yaitu dengan melimpahnya hasil pertanian (kopi) dan peternakan (susu) menjadi potensi besar yang dirancang untuk dikembangkan sebagai produk unggulan desa. Sebagaimana yang ada dalam data profil Desa Kalipucang Tahun 2016 dari 6 dusun yang ada yakni Dusun Kuntul Selatan, Kuntul Utara, Dodogan, Jelag, Cikur, Mucangan jumlah populasi sapi sudah mencapai 2.613 ekor dengan jumlah peternak yakni sebanyak 977 orang. Dengan adanya jumlah peternak dan jumlah

sapi yang banyak, potensi susu sapi perah yang dihasilkan dari Desa Kalipucang juga sangat melimpah. Hasil susu sapi perah ini kemudian didistribusikan ke beberapa KUD, toko, warung hingga keluar daerah.

Selain dengan adanya potensi hasil susu sapi perah yang melimpah, Desa Kalipucang juga memiliki potensi akan hasil pertanian kopi. Kopi menjadi favorit karena mayoritas warga Desa Kalipucang bekerja sebagai petani. Hampir setiap rumah memiliki kebun kopi dan masyarakatnya terbiasa mengkonsumsi kopi mereka sendiri. Lewat Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) kopi tersebut dijual kepada konsumen. Masyarakat desa kalipucang juga mendapatkan beberapa pelatihan dari dinas terkait dalam pengembangan produk UMKM seperti kripik pisang, serbuk jahe, sari minuman buah dll. Namun demikian pelaksanaan program yang diluncurkan pada tahun 2015 yaitu pada saat kepemimpinan Bupati HM. Irsyad Yusuf, SE., MMA di periode pertama nampaknya tidak berkelanjutan dengan visi misi yang diusung di periode kedua saat ini. Dengan adanya fenomena seperti ini, indikasinya dikarenakan tidak adanya konsistensi kebijakan dan komitmen dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Pelaksanaan dan dampak program desa masalah di Desa Kalipucang Kecamatan Tukur perlu untuk ditelaah dan dievaluasi lebih lanjut. Arikunto dan Jabar (2009:18) mengatakan bahwa tujuan diadakannya evaluasi program adalah

untuk mengetahui pencapaian tujuan program dengan langkah mengetahui keterlaksanaan kegiatan program. Program desa maslahat yang memiliki konsep OVOP dapat berdampak positif terhadap perekonomian desa adalah sebagai sebuah inovasi program kebijakan yang patut dipertahankan. Program kebijakan ini juga berdampak terhadap kehidupan sosial bermasyarakat dan menumbuhkembangkan disektor pariwisata, UMKM, pertanian dan lain-lain. Mencermati fenomena tersebut diatas maka penulis tertarik dalam menulis penelitian secara ilmiah terkait indikasi adanya keberhasilan dari pelaksanaan Program Desa Maslahat dan dampaknya terhadap perekonomian desa. Oleh karena itu penulis mengangkat judul penelitian “Evaluasi Sumatif Program Desa Maslahat di Desa Kalipucang Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan”.

METODE

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (1997:6) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Sedangkan Nazir (2003:54) mengemukakan penelitian dengan metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu sel kondisi, suatu sistem

pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang

Fokus dan Dimensi Penelitian

Terkait dengan fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi Program Desa Maslahat di Desa Kalipucang Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan berdasarkan dimensi evaluasi sumatif. Berdasarkan tipe evaluasi kebijakan menurut Dunn (2003) menyebutkan ada dua indikator evaluasi yaitu sumatif dan formatif. Dalam penelitian ini menggunakan evaluasi sumatif.
2. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Keberhasilan Program Desa Maslahat di Desa Kalipucang Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan.

Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dimana data primer diambil secara langsung pada narasumber secara wawancara dan data sekunder diperoleh dari hasil dokumentasi.

2. Sumber data

Dalam penelitian ini sumber data adalah seorang informan yaitu orang yang benar-benar tahu atau pelaku yang

terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Seorang informan yang akan dijadikan seorang informan di penelitian ini adalah: Kepala Desa dan Perangkat Desa, Kepala Dinas Pertanian, Kepala BAPPEDA dan Kepala Dinas terkait, Anggota DPRD, Tokoh masyarakat dan pelaku ekonomi.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis wawancara mendalam kepada informan yang memiliki kapasitas, Observasi, Dokumentasi yang ada di lokasi penelitian.

Teknik Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan dalam bentuk kualitatif; artinya disajikan dalam bentuk deskriptif kata-kata berdasarkan kutipan-kutipan hasil wawancara langsung dari bahasa yang diwawancarai dan berupa deskriptif tentang peristiwa dan pengalaman serta temuan dari lapangan.

Selanjutnya data-data diinterpretasikan dengan bantuan teori-teori untuk memperjelas permasalahan. Dengan pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan deskripsi secara menyeluruh terhadap masalah yang diteliti secara empiris dan teoritis.

Keabsahan Data

Teknik keabsahan data dalam penelitian ini didasarkan pada empat kriteria, antara lain:

1. Derajat Kepercayaan (*Credibility*)
2. Derajat Keteralihan (*Transferability*)
3. Derajat Ketergantungan (*Dependability*)
4. Derajat Kepastian (*Confirmability*)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan perumusan masalah, fokus dan dimensi penelitian dapat diketahui hasil penelitian tentang Evaluasi Sumatif Program Desa Masalah di Desa Kalipucang Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan. Evaluasi sumatif menurut Wirawan (2011) mengemukakan bahwa evaluasi sumatif berupaya mengukur indikator-indikator tertentu sebagai berikut:

A. Evaluasi Sumatif berdasarkan indikator-indikator menurut Wirawan (2011) yaitu :

1. Hasil Dan Pengaruh Layanan Program Desa Masalah

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan perlu disusun kebijakan yang strategis, terpadu dan terintegrasi dari semua pihak dengan mengikutsertakan masyarakat, organisasi, pemerintah dan pihak swasta dalam perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan diseluruh daerah. Pemerintah Kabupaten Pasuruan kemudian membuat terobosan dalam

menangani hal tersebut dan mengeluarkan Program Desa Maslahat (Maju Aman Sehat Lahir Batin, Adil dan Bermartabat). Program ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mengurangi beban masyarakat, pengentasan kemiskinan dan meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat di Kabupaten Pasuruan. Program Desa Maslahat adalah program inovasi daerah yang bertujuan untuk memaksimalkan potensi-potensi ekonomi yang ada di desa tertinggal dengan memaksimalkan potensi desa tersebut. Konsep “*One Village One Product*” dasar pelaksanaan Program Desa Maslahat dengan memaksimalkan potensi desa dan memprioritaskan produk-produk unggulannya. Hasil dan pengaruh dari program desa maslahat di Desa Kalipucang Kecamatan Tukur sejatinya berdampak positif dimana dengan adanya program ini masyarakat mendapatkan berbagai peningkatan sumber pendapatan baru dengan lahirnya produk UMKM yang semakin menggeliat contohnya adanya produksi kopi, susu sapi, kripik pisang dan olahan lainnya. Dengan program Desa Maslahat dapat

menggali potensi-potensi dari sumber daya alam guna pengembangan ekonomi masyarakat *resources basic local* sebagai dasar pembangunan keberlanjutan. Potensi pengembangan *basic local* bisa untuk mengantisipasi dampak insentif pembangunan pemerintah Kabupaten Pasuruan sekaligus menjaga keberlangsungan sosial - ekologi.

2. Persepsi Masyarakat Terhadap Program Desa Maslahat

Dalam pelaksanaan program Desa Maslahat seluruh Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pasuruan memaksimalkan tugas dan fungsinya dalam mengoptimalisasi potensi desa yang ada. Selain itu adanya peran dari stakeholder terkait juga cukup banyak dimana pihak swasta dan koperasi yang ada di sekitar Kecamatan Tukur juga turut membantu. Beberapa pihak yang terkait contohnya yaitu Koperasi Setia Kawan, Perusahaan PT. Sampurna dan Lembaga Averous yang juga turut andil didalamnya. Tentu saja ini menimbulkan banyak persepsi yang dirasakan masyarakat. Banyak manfaat yang telah didapatkan oleh program Desa

Maslahat. Namun ternyata ada masyarakat yang juga mengeluhkan adanya ketidakmaksimalan program ini. Desa Kalipucang dalam catatan angka pendidikan relatif tinggi, sebagaimana data BPS Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 tentang tingkat pendidikan SLTP sebanyak 614 orang, SLTA/SMK masyarakat tingkat pendidikan 545 orang, dan yang pendidikan pada perguruan tinggi Strata 1 sebanyak 29 orang. Artinya bahwa dalam tingkat pendidikan masyarakat tinggi berdampak terhadap perilaku masyarakat dalam partisipasi.

3. Menentukan Cost Effectiveness, Cost Efficiency, Dan Cost Benefit dalam pelaksanaan Program Desa Maslahat

Cost effectiveness, cost efficiency, dan cost benefit program desa maslahat dilakukan dengan tujuan untuk menentukan sukses keseluruhan pelaksanaan program. Secara umum pelaksanaan desa maslahat berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang cukup memuaskan. Terbukti pada tahun 2014-2019 Persentase penduduk miskin di Kabupaten Pasuruan dalam lima tahun terakhir menunjukkan penurunan dengan rata-rata penurunan sebesar 0,24

persen per tahun. *Cost benefit* ini tentu sejalan dengan tujuan umum program desa maslahat yakni adanya pengentasan kemiskinan di seluruh Kabupaten Pasuruan pada umumnya.

Cost dan Benefit dari pada program Desa Maslahat, sudah ada sejalan dengan tujuan umum program desa dengan pengentasan kemiskinan. Sebagaimana pengentasan kemiskinan atau peningkatan kesejahteraan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Dalam proses implementasi program masih kurang berkoordinasi antar dinas. Sehingga terdapat ketidak linieritasan dalam proses pertanggung jawaban dalam program Desa Maslahat.

4. Tujuan Umum Dan Tujuan Khusus Program Desa Maslahat

Evaluasi adalah kegiatan untuk mengukur tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi baru dapat dilaksanakan jika suatu kebijakan telah diterapkan dengan rentang waktu tertentu. Karena jika evaluasi dilakukan terlalu dini, maka outcome dan dampak kebijakan belum tampak. Evaluasi merupakan suatu tahapan yang penting karena suatu program membutuhkan input serta melihat bagaimana program

tersebut berjalan dan bagaimana dengan dampaknya. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan dari program Desa Maslahat berjalan dan terwujud sesuai dengan tujuan umum dan khusus yang dicanangkan. Akan tetapi perlu adanya perbaikan didalamnya

5. Manfaat Klien/Masyarakat Pada Program Desa Maslahat

Program Desa Maslahat memiliki tujuan khusus dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan dan meningkatkan pembangunan desa yang semula kurang maju menjadi lebih baik. Kondisi ini dapat terwujud manakala masyarakat yang ada di Desa Kalipucang telah merasakan dampak dari adanya kebijakan program desa maslahat. Seyogyanya memang kebijakan yang baik yakni menitik beratkan terhadap adanya manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Implementasi Desa Maslahat berjalan lebih kurang 3-4 tahun dimana dalam penerapan tersebut terdapat dampak yang telah dirasakan masyarakat setempat.

Program desa maslahat telah memberikan kontribusi dengan lahirnya wisata kampung susu, Coffee KUR, produk UMKM dan

melimpahnya hasil peternakan susu. Dengan adanya hal tersebut tentunya banyak sektor yang tergali misalnya dari sektor pariwisata, peternakan dan UMKMnya. Namun demikian sector-sector yang telah berkembang tersebut tidak lepas dari peran *stakeholder* lainnya. Banyak elemen lain yang mendukung seperti adanya Lembaga Averous yang memberikan pendampingan secara kesinambungan terhadap kemajuan desa Kalipucang

6. Komponen Penting dalam Program Desa Maslahat

Komponen sumberdaya dalam pelaksanaan Program Desa Maslahat di Desa Kalipucang secara kualitas pelaksana kegiatan sudah memadai, terlebih lagi sumberdaya manusia di Desa Kalipucang sangat baik dan pemberdayaan masyarakat berjalan efektif sebab ada banyak aktor yang mendukung, namun peran pemerintah masih bersifat sporadik dalam penerapan program Desa Maslahat.

Meskipun sarana dan prasarana masih kurang dikarenakan bantuan yang diberikan masih kurang secara kuantitas atau belum mencakup keseluruhan anggota kelompok petani kopi dan peternak

sapi, dalam penempatan pelaksanaan kegiatan mereka terlebih dahulu diberi pelatihan-pelatihan agar dapat melaksanakan program Desa Masalahat dengan efektif dan efisien. Aspek pemberdayaan masyarakat menjadi unsur yang efektif dalam pelaksanaan program.

7. Menentukan Keluaran Yang Tidak Diantisipasi Dari Program

Program desa masalahat yang ada di Desa Kalipucang memiliki dampak terhadap perekonomian masyarakatnya. Namun demikian juga terdapat keluaran yang tidak diantisipasi oleh program desa masalahat. Selain tidak adanya dana desa yang dianggarkan dalam pelaksanaan desa masalahat, banyak keluaran dampak yang tidak diantisipasi program dari segi lingkungan hidup. Perhatian yang awalnya tertuju dengan adanya peningkatan ekonomi justru melahirkan sumber masalah baru dimana adanya pengalihan konsentrasi masyarakat dari sisi lingkungan

8. Menentukan Cost Dan Benefit Program

Pemerintah Kabupaten Pasuruan menyiapkan anggaran yang besar dalam pelaksanaan program

Desa Masalahat. Kemiskinan dan keterbelakangan menjadi sasaran umum program ini. sehingga pemerintah sangat fokus dalam upaya pengentasan kemiskinan di desa-desa. Berdasarkan tabel diatas dapat kita ketahui bersama bahwa program kebijakan pemerintah membutuhkan cost atau anggaran demi terlaksananya program dan kegiatan tersebut. Tentunya selain adanya anggaran yang diperlukan hal ini juga menimbulkan adanya dampak atau manfaat yang diterima masyarakat.

9. Mengkomunikasikan Hasil Evaluasi kepada Pemangku Kepentingan

Mengomunikasikan temuan evaluasi kepada para pemangku kepentingan sangat penting dilakukan. Hal ini agar menjadi konsumsi publik akan adanya keberlangsungan kebijakan pemerintah. Kondisi existing desa masalahat Kabupaten Pasuruan sampai tahun 2016 yaitu adanya jumlah penduduk miskin sebanyak 550 jiwa, jumlah RTLH sebanyak 50 rumah, penerima beras miskin sebanyak 334 jiwa dan jumlah pengangguran sebanyak 363. Sedangkan untuk jumlah balita gizi buruk sebanyak 0 bayi. Data tersebut merupakan temuan hasil evaluasi

sebagian yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Selama ini belum terdapat hasil evaluasi program desa maslahat yang dirilis secara resmi oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Temuan hasil evaluasi ini sangat penting dimana menjadi acuan hasil yang dapat dilihat dan diukur bersama terkait pelaksanaan program.

10. Penilaian terhadap Keberlanjutan Program Desa Maslahat

Selama ini program pemerintah harus memiliki keberlangsungan atau keberlanjutan sebagai cost and benefit. Sebagai indikator didalam evalasi terhadap dampak program implementasi Desa Maslahat. Namun dalam implementasi terdapat kepentingan, nilai, aturan dan prosedur Organisasi, Lingkungan sosial-ekonomi yang lebih luas di mana lembaga-lembaga politik beroperasi serta kecenderungan-kecenderungan untuk legislator, pejabat birokrasi, dan pemimpin kelompok kepentingan terkait dengan bidang kebijakan tertentu untuk membentuk kebijakan subsistem relatif otonom.

Evaluasi sumatif digunakan untuk menilai kegunaan suatu

program. Dalam evaluasi sumatif berfokus terhadap dampak atau keberhasilan yang tercapai. Fokus pada evaluasi sumatif adalah variabel-variabel yang dipandang penting dan berhubungan dengan kebutuhan pengambilan keputusan Evaluasi menurut Arikunto (2010:1) yaitu evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai dari beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Penerapan kebijakan pasti tidak lepas dari dampak yang diakibatkan atau benefit yang didapatkan dari penerapan kebijakan tersebut. Dampak (impact) merupakan akibat lebih jauh dari pada masyarakat sebagai konsekuensi adanya kebijakan yang diimplementasikan. Tidak terkecuali pada kebijakan program Desa Maslahat di Desa Kalipucang yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Pasuruan kepada masyarakat. Setelah dilaksanakannya program Desa Maslahat di Desa Kalipucang sejak tahun 2014-2019 memberikan dampak dari pelaksanaan program diantaranya peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan produktivitas dan perekonomian masyarakat,

peningkatan kemandirian masyarakat.

B. Evaluasi Partisipasi dan Mal Function Manajemen Program Desa Masalah

Dalam tujuan program Desa Masalah yakni meningkatkan adanya kesejahteraan bagi masyarakat desa yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai desa tertinggal, untuk dikembangkan kewirausahaannya masyarakat di desa tersebut yang berbasis pada potensi lokal baik pertanian, peternakan ataupun UMKM. Saat dievaluasi program kebijakan pelaksanaan program Desa Masalah belum berpengaruh atau merubah secara signifikan terhadap pendidikan, keluarga berencana sehingga tidak jauh berbeda terhadap kondisi ekonomi masyarakat di Desa Kalipucang.

Upaya yang dilakukan ini terlihat tidak ada perubahan signifikan sehingga program Desa Masalah perlu di reform sehingga dapat berjalan dengan efektif dan efisien sehingga benar berdampak terhadap perubahan tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Kalipucang. Meskipun pelaksanaan Desa Masalah yang ada di Desa Kalipucang Kecamatan Tutur mendapat persepsi yang baik dari masyarakat dan masyarakat benar-benar telah merasakan dampak dari program desa masalah. Tetapi dalam prakteknya

terdapat banyak kekurangan tetapi secara umum dari sisi masyarakat, aparatur pemerintah desa dan pelaku usaha didalamnya mengatakan adanya ketepatan dan kepuasan yang baik dari masyarakat atau kelompok masyarakat.

Masih terdapat rendahnya penyerapan anggaran. Selaras dengan dampak rendahnya program Desa Masalah dalam pemenuhan upaya program pengentasan kemiskinan maka diperlukan didalam program tersebut mengukur *cost and benefit* atas biaya yang digunakan dalam pengembangan program tersebut. Besar anggaran program prestis sebesar 48 M tidak berdampak signifikan terhadap kondisi masyarakat maka terjadi ketidakberjalanannya fungsi manajemen (*mal function*) sebagai Planning, Organizing, Actuating dan Controlling (POAC). Tidak berjalannya fungsi manajemen program Desa Masalah di Kabupaten Pasuruan disebabkan pemerintah masih belum memahami pengembangan organisasi yang selalu mengkaitkan dengan lingkungan atas upaya pemerintah guna mengantisipasi terhadap banyaknya pengaruh-pengaruh dari lingkungan masyarakat.

Menurut Hadi (2011:13) mendefinisikan evaluasi sebagai proses mengumpulkan informasi mengenai suatu objek, menilai suatu objek, dan membanding-

kannya dengan kriteria, standar dan indikator. Sejalan dengan hal tersebut evaluasi sumatif menurut Wirawan (2011) berupaya untuk mengukur indikator-indikator seperti menentukan apakah tujuan umum dan tujuan khusus program telah tercapai atau belum tercapai. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam pelaksanaan program Desa Maslahat di Desa Kalipucang Kecamatan Tukur peneliti menemukan bahwa pelaksanaan program tersebut telah berjalan dengan lancar. Namun demikian dampak yang dirasakan bukanlah semata-mata hasil dari adanya program Desa Maslahat akan tetapi karena melibatkan semua aspek dan stakeholder serta potensi desa yang telah ada.

C. *Unsustainable Program Local Wisdom Basic dalam Program Desa Maslahat*

Adanya manfaat yang dirasakan masyarakat sebagai penerima layanan atau pengguna program Desa Maslahat menjadi ujung keberhasilan pelaksanaan program. Apabila masyarakat mendapatkan manfaat yang signifikan dengan adanya program tersebut maka program Desa Maslahat di Desa Kalipucang telah berhasil. Manfaat dari program ini berkaitan erat dengan responsivitas program kepada masyarakat. Respon-

sivitas dalam kriteria evaluasi kebijakan mengindikasikan adanya kepuasan layanan yang dirasakan masyarakat, kelompok, preferensi dll. Dunn (2003) mengatakan responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.

Selama kurang lebih 4 tahun berjalannya program di Desa Kalipucang masyarakat mengalami kenaikan pendapatan dari adanya desa wisata, kenaikan jumlah sapi dan produksi susu, jumlah panen kopi yang melimpah serta adanya UMKM baru seperti kripik pisang dll yang semakin maju dan berkembang. Tentunya dengan keadaan seperti nampak jelas bahwa masyarakat merasakan manfaat dengan adanya program Desa Maslahat.

Wirawan (2011) mengungkapkan indikator dalam evaluasi sumatif terhadap suatu program diperlukan adanya identifikasi komponen yang mana yang paling efektif dalam implementasi program. Desa Kalipucang Kecamatan Tukur dengan berbagai potensi alam dan SDM yang dimiliki tentu menjadi komponen yang efektif dalam menentukan keberhasilan program desa maslahat. Selain itu, komponen

pemberdayaan dan tingginya partisipasi masyarakat terhadap program ini sangat mempengaruhi keberhasilan program. Meskipun pada kenyataannya dalam desa ini masih terdapat angka pengangguran terbuka yang cukup tinggi.

D. Dinamika Program Desa Masalah dan Perubahannya

Implementasi sebuah program pemerintah tentu akan selalu mendapat berbagai hambatan yang ditemuinya. Konsep yang telah dibentuk akan selalu mendapatkan rintangan dalam pelaksanaan baik secara mikro maupun makro. Banyak dampak yang telah dihasilkan dalam pelaksanaan program desa masalah di Desa Kalipucang Kecamatan Tukur. Akan tetapi juga banyak dampak atau keluaran yang tidak diantisipasi dalam program ini. Wirawan (2011) mengemukakan indikator adanya evaluasi sumatif dalam pelaksanaan suatu program salah satunya yaitu menentukan keluaran yang tidak diantisipasi dari program. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan juga ditemukan beberapa keluaran yang tidak diantisipasi program diantaranya timbulnya masalah baru sehingga mendorong pengalihan perhatian dan tindakan, sumber daya tidak memadai dan banyak masalah publik yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat.

Hal ini juga dibenarkan oleh Anderson (1978) yang mengatakan faktor penyebab kebijakan tidak memperoleh dampak yg diinginkan atau adanya dampak/keluaran yang tidak diantisipasi program diantaranya

- a. Sumber daya tidak memadai
- b. Cara implementasi yang tidak tepat
- c. Masalah publik sering disebabkan banyak faktor tetapi kebijakan yg dibuat hanya mengatasi satu faktor saja
- d. Cara menanggapi kebijakan yang justru dapat mengurangi dampak yg diinginkan
- e. Tujuan-tujuan kebijakan tidak sebanding bahkan bertentangan satu sama lain
- f. Biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar dari masalahnya
- g. Banyak masalah publik yang tidak mungkin dapat diselesaikan
- h. Timbulnya masalah baru sehingga mendorong pengalihan perhatian dan tindakan
- i. Sifat dari masalah yang akan dipecahkan (Anderson, 1978)

Evaluasi kebijakan menginformasikan bahwa evaluasi kebijakan tidak sekedar mengumpulkan informasi mengenai kebijakan yang dapat diantisipasi dan yang tidak dapat diantisipasi, tetapi evaluasi diarahkan untuk memberi informasi pada masa lalu,

masa sekarang dan masa yang akan datang. Selain itu, evaluasi kebijakan diarahkan untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi (atau rendah) bagi semua individu, kelompok dan masyarakat apabila adanya aksi-aksi yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Menurut Dunn (2003) Evaluasi merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program, dan bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi dan tidak terantisipasi. Karena ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan dapat selalu dipertanyakan, evaluasi mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujuan-tujuan dan sasaran itu sendiri. Evaluasi merupakan suatu usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial suatu kebijakan atau program dan bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan.

Hal inilah yang membedakan evaluasi dengan monitoring. Monitoring dilakukan ketika sebuah kebijakan sedang diimplementasikan agar kesalahan-kesalahan awal dapat segera diperbaiki sehingga mengurangi risiko yang lebih besar. Evaluasi mencakup

prosedur untuk mengevaluasi tujuan-tujuan dan sasaran kebijakan untuk menentukan bahwa kebijakan telah mencapai kinerja tinggi atau rendah dengan didukung oleh bukti bahwa hasil-hasil kebijakan secara aktual merupakan konsekuensi dari aksi-aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu. Sehubungan dengan hal tersebut, pemantauan (monitoring) merupakan prasyarat bagi evaluasi.

Tuntutan evaluatif diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu dibandingkan hasil di masa depan, karenanya evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksi-aksi dilakukan (*ex-post*), rekomendasi yang dihasilkan bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi selanjutnya dilakukan (*ex-ante*). Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda karena dipandang sebagai tujuan sekaligus cara. Evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai-nilai yang ada dan dianggap sebagai intrinsik (diperlukan bagi pencapaian tujuan) ataupun ekstrinsik (diperlukan karena hal itu memengaruhi pencapaian tujuan lain).

E. Koordinasi dan Komunikasi Program Desa Maslahat

Pelaksanaan kebijakan Desa Masalah yang ada di Desa Kalipucang Kecamatan Tutur berdasarkan dari Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Program Desa Masalah. Dalam Peraturan Bupati tersebut berisikan maksud dari adanya program desa masalah. Maksud dari Program Desa Masalah yaitu untuk mengintegrasikan program dan kegiatan OPD, peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam rangka mempercepat terwujudnya Desa Masalah.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, masih belum terdapat data penunjang adanya hasil evaluasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif adanya kebijakan Desa Masalah. Pemerintah daerah belum memiliki hasil evaluasi program Desa Masalah yang dirilis secara resmi dan akuntabel. Sejatinnya evaluasi kebijakan ditujukan untuk mengukur secara riil dengan indikator tertentu bagaimana hasil pelaksanaan desa masalah. Sebagaimana yang dikemukakan Arsyad (1999:134) bahwa evaluasi mempunyai satu tujuan utama yaitu untuk mengetahui berhasil atau tidaknya suatu program. Selama ini keberhasilan desa masalah yang digaungkan oleh pemerintah daerah hanya bersumber dengan adanya pendapat, penghargaan dan kemajuan pembangunan secara fisik. Hasil evaluasi

desa masalah belum nampak dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan juga dengan lintas OPD.

Miss communication organitation pada program Desa Masalah antara tanggung jawab sebagaimana Asisten 2 Sekretaris Daerah yang menangani program pembangunan dan ekonomi terlihat adanya institusi yang tidak dikelola dengan baik, tidak adanya assasment atau mekanisme dalam pendelegasian dan distribusi program secara tepat dilapangan, malah justru yang terjadi sebagai formaslitik terhadap pelaksanaan program Desa Masalah. Dalam Wirawan (2011) dalam mengukur evaluasi sumatif diperlukan indikator adanya temuan evaluasi yang dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan yang lainnya. Nampaknya program desa masalah yang ada di Desa Kalipucang belum memiliki kajian evaluasi secara riil sehingga para stakeholder terkait belum mendapat data dan informasi yang bersifat akuntabel dan transparan terhadap keberlangsungan program desa masalah.

Evaluasi bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembuat kebijakan tentang bagaimana program-program kebijakan yang telah dilaksanakan maupun yang sedang berlangsung. Serta menunjukkan faktor-faktor apa saja yang dapat dimanipulasi

agar diperoleh pencapaian hasil yang lebih baik, untuk kemudian memberikan alternatif kebijakan baru atau sekedar cara implementasi lain. Jika program ternyata bermanfaat, akan tetapi pelaksanaannya tidak *cost-efficient* maka harus dilakukan perubahan mengenai anggarannya. Menurut Dunn (2003) evaluasi memberi sumbangan padaaplikasimetode-metode analitis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentangtidak memadainya kinerja kebijakan dapat memberikan sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan dan definisi alternatif kebijakan yang baruatau revisi kebijakan dengan menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang diunggulkan sebelumnya perlu dihapus atau diganti dengan yang lain.

F. Faktor-Faktor Yang Mendukung Dan Menghambat Program Desa Maslahat Di Desa Kalipucang Kecataman Tuter Kabupaten Pasuruan

Kebijakan Desa Maslahat yang ada di Desa Kalipucang Kecamatan Tuter berjalan dengan baik dimana terdapat sinergitas dari para pemangku kepentingan. Namun demikian tentu terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan

kebijakan desa maslahat di Desa Kalipucang Kecamatan Tuter.

✓ Faktor Pendukung Implementasi Program Desa Maslahat di Desa Kalipucang Kecamatan Tuter

Adanya dukungan dan sinergitas antar *stakeholder* yang berkesinam-bungan;

- a. Tingginya tingkat pemberdayaan danpartisipasi masyarakat yang menjadi kelompok sasaran kebijakan;
- b. Pembagian tugas dan fungsi yang efektif dalam pelaksanaan;
- c. Melimpahnya sumber daya alam dan SDM yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan.

✓ Faktor Penghambat Implementasi Program Desa Maslahat di Desa Kalipucang Kecamatan Tuter

Faktor penghambat merupakan suatu kendala yang selalu ada di setiap kebijakan, karena faktor penghambat ini membuat pelaksanaan kebijakan kurang berjalan dengan lancar, sehingga menimbulkan beberapa persoalan dan mengurangi tingkat keberhasilan program yang telah dicanangkan. Adapun faktor penghambat pelaksanaan program desa maslahat di Desa Kalipucang Kecamatan Tuter yaitu diantaranya:

- a. Minimnya anggaran yang diperuntukkan dalam pelaksanaan kebijakan

- b. Pimpinan OPD yang kurang inovatif dan responsif terhadap keberlangsungan program
- c. Tidak adanya kesinambungan program yang terukur dan terarah berdasarkan acuan indikator pencapaian-pencapaian kebijakan
- d. Pelaksanaan kebijakan cenderung bersifat seremonial dan rutinitas

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Evaluasi Sumatif Program Desa Maslahat di Desa Kalipucang Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan dapat disimpulkan yaitu:

1. Program Desa Maslahat yang diimplementasikan sejak tahun 2014-2019 di Desa Kalipucang Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan secara umum telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator evaluasi sumatif yang tercapai dengan baik meskipun beberapa indikator Nampak belum tercapai dengan baik atau berjalan dengan maksimal.
2. Dalam pengelolaan atau manajemen organisasi program Desa Maslahat hanya bersifat implementatif formal dari tupoksi masing-masing OPD.
3. Program Desa Maslahat bersifat unsustainable program yang disebabkan kurangnya mengakomodir terhadap potensi local wisdom yang ada di desa

dan kurangnya political will pemerintah daerah.

4. Adanya faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi program ini misalnya tingginya tingkat pemberdayaan dan partisipasi masyarakat yang menjadi kelompok sasaran kebijakan tetapi tidak adanya kesinambungan program yang terukur dan terarah berdasarkan acuan indikator pencapaian-pencapaian kebijakan dan pelaksanaan kebijakan cenderung bersifat seremonial dan rutinitas menjadi faktor penghambat.

Saran

1. Diperlukan kejelasan tahapan assesment program awal guna melihat basic need masyarakat yang ada di desa.
2. Memberlakukan program secara bertahap tergantung tingkat pelaksanaan program dan mengklasifikasikan desa yang termasuk rintisan atau pengembangan sebagai master plan program Desa Maslahat.
3. Program tersebut menjadi tanggung jawab dari masing-masing OPD yang dimonitoring langsung oleh Asisten II Bagian Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan tidak dilimpahkan atau didelegasikan kepada OPD yang lainnya.
4. Pemerintah Kabupaten Pasuruan perlu melakukan evaluasi program bersifat *on*

going/ evaluasi formatif pada pelaksanaan Program Desa Maslahat. Pemerintah Kabupaten Pasuruan hendaknya melakukan redesign program kebijakan Desa Maslahat dengan manajerial yang lebih baik, konsep dan metode serta SOP program yang lebih terarah, terukur dan tersistematis.

percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM.

Keputusan Bupati Pasuruan Nomor: 400/670/HK/424/.013/2014 tentang

penetapan lokasi Program desa maslahat

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Program Desa Maslahat

Internet

<http://www.bps.go.id> Diakses 17 Agustus 2020.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, James E. 1978. *Public Policy Making*. New York: Holt Rinehart and Winston.
- Arsyad, Lincolin. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPFE.
- Bobo, Julius, 2003. *Transformasi Ekonomi Rakyat*. Cidesindo, Jakarta.
- Dunn, N. William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi kedua. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hadi, Samsul. 2011. *Metode Riset Evaluasi*. Yogyakarta: Lakbang Grafika.
- Irawan, Rizky Restu (2017) *Kegagalan Implementasi Program One Village One Product (Ovop) Dalam Memajukan Potensi Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) (Studi Kasus: Koperasi Serba Usaha Mulyasari Desa Pliken, Kecamatan Kembaran)*. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman. <http://repository.unsoed.ac.id/id/eprint/2221> Diakses 30 November 2020.
- Islamy, Irfan M, 2008. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Nazir, Moh. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. 1997. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Wirawan. 2011. *Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Peraturan-Peraturan

Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 mengenai